

**REPRESENTASI KLIENTELISME PADA DINAMIKA PEMILU PRESIDEN 2024 DALAM  
FILM ESAI “DIRTY VOTE”  
(ANALISIS SEMIOTIKA CHARLES SANDERS PEIRCE)**

**Fathir Rofi Ghaniyu Jayantio**

Prodi Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Negeri Surabaya

Email: [fathirrofi.20050@mhs.unesa.ac.id](mailto:fathirrofi.20050@mhs.unesa.ac.id)

**Muhammad Danu Winata, S.Sos, M.A., MSi (Han).**

Prodi Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Negeri Surabaya

Email: [muhammadwinata@unesa.ac.id](mailto:muhammadwinata@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Pemilu sebagai fondasi demokrasi elektoral Indonesia kerap disusupi praktik klientelisme yang memanfaatkan relasi patron-klien serta instrumen negara untuk kepentingan elektoral. Film esai *Dirty Vote* (2024) karya Dandhy Dwi Laksono menjadi media kritik yang menyoroti praktik manipulatif kekuasaan dalam Pemilu Presiden 2024. Penelitian ini bertujuan mengungkap representasi klientelisme dalam film tersebut melalui pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce. Dengan menggunakan metode kualitatif interpretatif, analisis difokuskan pada tanda-tanda visual, verbal, dan simbolik dalam beberapa adegan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Dirty Vote* merepresentasikan bentuk klientelisme melalui simbol visual seperti pembagian bantuan sosial, mobilisasi kepala desa, dan netralitas semu pejabat publik. Tanda-tanda tersebut membentuk makna ideologis yang menunjukkan bagaimana demokrasi prosedural dibajak oleh relasi kekuasaan yang tidak adil. Film ini berfungsi sebagai teks budaya resistensi yang menantang hegemoni narasi resmi negara, serta menjadi bentuk artikulasi unruly politics melalui media visual. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman terhadap praktik klientelisme elektoral di Indonesia sekaligus memperkaya kajian komunikasi politik visual.

**Kata kunci** : Semiotika Charles Sanders Peirce, Klientelisme, Representasi, Film Esai

**Abstract**

*Elections, as the foundation of Indonesian electoral democracy, are often infiltrated by clientelism practices that exploit patron-client relations and state instruments for electoral gain. Dandhy Dwi Laksono's essay film, Dirty Vote (2024), serves as a critical medium highlighting the manipulative practices of power in the 2024 Presidential Election. This Study aims to uncover the representation of clientelism in the film through Charles Sanders Peirce's semiotic approach. Using interpretive qualitative methods, the analysis focuses on visual, verbal, and symbolic signs in several key scenes. The results show that Dirty Vote represents forms of clientelism through visual symbols, such as the distribution of social assistance, the mobilization of village heads, and the apparent neutrality of public officials. These signs create ideological meanings that demonstrate how procedural democracy is hijacked by unjust relational power. This film serves as a cultural text of resistance, challenging the hegemony of official state narratives while also serving as a form of articulation of unruly politics through visual media. This research contributes to broadening the understanding of electoral clientelism practices in Indonesia while enriching the study of visual political communication.*

**Keywords:** Charles Sanders Peirce's Semiotic, Clientelism, Representation, Essay Film

## PENDAHULUAN

Demokrasi elektoral di Indonesia kerap kali terdistorsi oleh praktik informal seperti klientelisme dan patronase politik yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral. Fenomena ini menggambarkan paradoks antara prosedur pemilu yang demokratis secara formal dan praktik manipulatif yang merusak esensi demokrasi.

Aspinall menekankan bahwa klientelisme di Indonesia berlangsung dalam berbagai bentuk, termasuk pembelian suara (*vote buying*), distribusi bantuan sosial, dan penempatan individu dalam jabatan publik berdasarkan loyalitas politik, bukan kompetensi. Fenomena ini sangat bergantung pada jaringan sosial dan perantara seperti tokoh masyarakat, kepala desa, atau tim sukses yang berperan sebagai broker atau perantara antara patron dan klien (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Tanpa adanya dukungan dari jejaring sosial yang bersifat personal dan informal klientelisme tidak bisa berjalan efektif, jejaring ini menjadi tulang punggung dalam distribusi imbalan politik, mobilisasi dukungan, dan pembentukan loyalitas. Dalam konteks demokrasi elektoral yang tidak berbasis ideologi dan institusi yang kuat, jejaring sosial ini menjadi semacam “infrastruktur politik” yang memungkinkan klientelisme terus bertahan dan berkembang.

Asal-usul klientelisme di Indonesia dapat ditelusuri ke era pra-kolonial dan kolonial. Pada masa pra-kolonial, sistem kekuasaan feodalistik di banyak wilayah Nusantara telah membentuk relasi patron-klien yang berbasis hierarki dan kewajiban timbal balik antara raja atau bangsawan dengan rakyatnya.

Struktur sosial tradisional ini kemudian dipertahankan dan dimodifikasi oleh pemerintah kolonial Belanda melalui strategi *indirect rule*, yaitu pemerintahan tidak langsung yang memanfaatkan para elite lokal sebagai perantara kekuasaan kolonial. Para bupati, kepala adat, dan elite priyayi dijadikan kaki tangan pemerintah kolonial dalam menjalankan administrasi pemerintahan, pengumpulan pajak, hingga menjaga stabilitas politik (Ricklefs, 2008).

Disusul oleh masa pascakemerdekaan, kala itu tidak serta-merta menghapus praktik klientelisme, melainkan justru memperkuatnya dalam format yang lebih terlembagakan. Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, patronase politik berlangsung melalui hubungan informal antara negara dan elite politik berbasis ideologi nasionalis atau agama.

Namun, barulah pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, klientelisme berkembang menjadi sistem politik yang sangat terstruktur dan tersentralisasi. Negara menjadi aktor utama dalam pendistribusian sumber daya, sementara loyalitas politik menjadi kunci untuk mengakses kekuasaan.

Setelahnya, Reformasi 1998 menandai titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia. Meskipun menumbangkan rezim otoriter dan membuka jalan bagi demokratisasi, namun praktik klientelisme tidak serta-merta menghilang. Justru, dalam konteks demokrasi elektoral yang kompetitif dan sistem otonomi daerah, praktik klientelisme mengalami transformasi baru.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dan desentralisasi fiskal memberikan ruang bagi elite lokal untuk membangun basis kekuasaan melalui hubungan patron-klien yang lebih fleksibel dan terdesentralisasi (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Sehingga, pasca-reformasi, politisi lokal memiliki kontrol signifikan terhadap alokasi anggaran daerah, rekrutmen birokrasi, dan penyaluran bantuan sosial. Hal ini mendorong berkembangnya praktik politik uang dan patronase dalam pemilihan umum.

Dalam banyak kasus, kandidat kepala daerah menjalin kontrak informal dengan pemilik modal dan broker politik (*calo suara*), di mana modal kampanye ditukar dengan akses terhadap proyek dan sumber daya daerah jika mereka menang. Sementara masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, dijadikan klien yang “dibeli” melalui janji bantuan, proyek kecil, atau tunjangan sosial (Berenschot, 2018).

Lebih jauh, pola klientelisme kontemporer juga menyentuh institusi negara yang seharusnya netral, seperti aparat desa, ASN, dan institusi pelayanan publik. Dalam pemilu

2024, misalnya, muncul berbagai laporan tentang keterlibatan aparat negara dalam mendukung calon tertentu melalui pendistribusian bantuan sosial dan instrumen program pemerintah lainnya (Kompas, 2024).

Transformasi ini menunjukkan bahwa relasi patronase tidak hanya berlangsung secara vertikal antara elite dan massa, tetapi juga horizontal di antara elite politik itu sendiri. Dalam sistem multipartai yang kompleks, banyak aktor politik membangun aliansi berdasarkan pertukaran kepentingan dan sumber daya.

Dalam konteks film esai *Dirty Vote* (2024), sebuah karya Dandhy Dwi Laksono, hal ini menjadi diskursus kritis dan ekspresif yang menggugah kesadaran publik terhadap ancaman sistemik dalam proses pemilu. *Dirty Vote* memadukan dokumenter, narasi reflektif, dan visualisasi simbolik untuk mengeksplorasi berbagai bentuk ketidakadilan elektoral.

Film ini secara eksplisit “membongkar praktik-praktik manipulatif yang dilakukan oleh aktor-aktor negara” dan menyampaikan kritik melalui suara narator pakar hukum serta dokumentasi media yang disusun secara argumentatif dan performatif. Sebagaimana disampaikan Rascaroli (2009), essay film “bersifat subjektif, argumentatif, dan performatif, di mana sutradara berperan aktif sebagai pengarang yang menyampaikan ide kritis melalui montase, narasi, dan simbol visual.”

Film ini menyoroti isu-isu seperti mobilisasi kepala desa, keterlibatan pejabat pemerintah, serta distribusi bansos yang diarahkan secara politis. Representasi semacam ini selaras dengan konsep *state-sponsored clientelism* dari Aspinall (2013), yakni ketika “negara digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan dominasi politik tertentu, bukan sebagai penjamin netralitas publik.” Praktik ini juga tampak dalam adegan-adegan yang menunjukkan bagaimana bantuan sosial dibagikan dengan narasi keberpihakan, atau bagaimana aparat negara tampil sebagai tim sukses terselubung dari kandidat tertentu.

Lebih dari itu, *Dirty Vote* mengangkat persoalan netralitas lembaga penyelenggara

pemilu. Salah satu adegan menyoroti “Ketua Pansel KPU/Bawaslu yang memiliki jejak politik sebagai tim sukses dari Jokowi pada pemilu sebelumnya dan kini menjadi bagian dari tim sukses paslon Prabowo-Gibran,” menandakan bahwa konflik kepentingan telah masuk ke dalam institusi yang seharusnya independen.

Secara metodologis, film ini beroperasi sebagai bentuk *unruly politics*, yaitu politik yang “tidak tunduk pada kanal institusional formal, melainkan menciptakan tekanan dari luar sistem melalui wacana media” (Ferdiansah, 2024). Dengan viralitas tinggi di YouTube (mencapai 4,1 juta penonton dalam beberapa hari), film ini bukan sekadar karya sinema, tetapi juga menjadi bentuk resistensi terhadap narasi dominan yang direproduksi oleh negara dan media arus utama.

Studi-studi awal seperti Aisyah & Suratnoaji (2024) dan Sari et al. (2024) telah meneliti film ini dari sudut pandang framing dan pengaruhnya terhadap opini publik. Namun, penelitian ini mengambil pendekatan berbeda, yaitu menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce untuk menelaah “bagaimana tanda-tanda visual, verbal, dan simbolik dalam *Dirty Vote* merepresentasikan praktik klientelisme secara laten dan eksplisit.”

Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk representasi klientelisme dalam *Dirty Vote*.
2. Menafsirkan makna simbolik dari praktik tersebut melalui relasi antara representamen, objek, dan interpretant sebagaimana dijelaskan Peirce.
3. Menjelaskan bagaimana film ini membangun wacana alternatif yang menginterogasi sistem demokrasi elektoral Indonesia melalui teks visual yang bersifat ideologis.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan fokus pada analisis tanda visual dan simbolik dalam film *Dirty Vote* (2024). Metode yang

digunakan adalah analisis semiotika Charles Sanders Peirce, yang menelaah hubungan antara *representamen* (tanda), *objek* (rujukan nyata), dan *interpretant* (makna yang dihasilkan). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap konstruksi makna dalam teks visual.

Objek penelitian adalah film *Dirty Vote* karya Watchdoc Documentary, dengan unit analisis berupa adegan-adegan yang mengandung indikasi praktik klientelisme, seperti distribusi bantuan sosial, kampanye terselubung, dan keterlibatan pejabat negara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi mendalam terhadap elemen visual, naratif, dan tekstual dalam film. Data dikoding secara tematik, lalu dianalisis dengan mengidentifikasi jenis tanda berdasarkan kategori Peirce: ikon, indeks, dan simbol. Analisis juga mempertimbangkan konteks sosial-politik yang melatarbelakangi produksi dan persebaran film, serta ditopang dengan teori klientelisme dari Edward Aspinnall.

Analisis dilakukan secara bertahap:

1. Identifikasi adegan kunci yang mengandung indikasi klientelisme,
2. Klasifikasi elemen tanda (visual, verbal, spasial),
3. Penafsiran makna berdasarkan triadik Peirce dan konteks klientelisme Indonesia.

Pendekatan interpretatif ini memungkinkan pembacaan film sebagai teks budaya yang tidak netral, melainkan sarat dengan ideologi dan makna politis yang ingin disampaikan kepada publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis bagaimana klientelisme direpresentasikan dalam film esai *Dirty Vote* dengan menggunakan metode analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Peirce membagi tiga tahapan tanda, dimulai dari penyerapan aspek tanda atau representament melalui panca indra. Tahap kedua, mengaitkannya dengan pengalaman kognisi manusia yang disebut object. Tahap ketiga, menafsirkan

objek sesuai dengan keinginannya yang disebut interpretant (Sobur, 2021:15).

### 1. Analisis Tanda pada Adegan-Adegan Utama

#### a. Adegan Masuknya Pakar Hukum Tata Negara



Adegan siluet pakar hukum yang memasuki ruangan gelap dengan hanya cahaya dari pintu merupakan bentuk komunikasi visual yang sangat simbolis dan kuat. Sebagai *qualisign*, adegan ini bekerja melalui kualitas visual, kontras antara terang dan gelap, serta kehadiran sosok manusia dalam siluet tanpa identitas yang jelas. Tidak ada dialog atau narasi verbal yang mengiringi saat itu, hanya atmosfer visual yang memicu interpretasi. Tanda ini bukan menunjuk pada peristiwa konkret, melainkan pada nuansa perasaan dan kesan awal yang ingin dibangun oleh film, bahwa pemirsa akan “masuk” ke dalam ruang yang penuh rahasia dan potensi kegelapan.

*Object* dari tanda ini adalah gagasan tentang politik gelap, manipulatif, dan koruptif, serta penyalahgunaan kekuasaan yang tersembunyi dari pandangan publik. Relasi antara tanda dan objek bersifat *ikonik*, karena bentuk tanda ini (ruang gelap, siluet, cahaya samar) menyerupai ide tentang sesuatu yang misterius, tersembunyi, dan membutuhkan pencahayaan untuk bisa dilihat. Dalam konteks *Dirty Vote*, ruang gelap ini menjadi metafora dari sistem pemilu dan kekuasaan di Indonesia yang diselubungi oleh praktik transaksional dan manipulasi hukum.

*Interpretant* yang muncul pada tahap ini adalah *rheme*, pemaknaan yang belum sepenuhnya eksplisit, tetapi membuka kemungkinan makna bagi penonton. Ini adalah ajakan bagi penonton untuk bersiap menguak sesuatu yang belum diketahui secara penuh. Dengan menggunakan bahasa visual seperti ini, film membangun ekspektasi bahwa narasi berikutnya akan

bersifat investigatif dan kritis, dan bahwa pengetahuan yang akan dibawa ke permukaan berasal dari wilayah yang selama ini tertutup rapat. Adegan ini penting karena menempatkan penonton tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai bagian dari proses membuka tabir kekuasaan yang tersembunyi, yang merupakan inti dari kritik terhadap sikap lembaga politik di Indonesia. Dimana, di setiap tingkatan, lembaga politik formal dibayangi oleh jaringan informal yang bersifat personal yang melaluinya mengalir keuntungan dan bantuan material (Aspinall & Berenschot, 2019).

#### b. Adegan Menayangkan Video Deklarasi Politik Gibran



Adegan ini merupakan salah satu momen penting dalam film *Dirty Vote* yang menyoroti praktik klientelisme politik melalui penggambaran simbolik yang kuat. Kehadiran Gibran di atas panggung yang melakukan orasi politik dengan mengucapkan “Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini” bukan sekadar adegan kampanye biasa, melainkan menggambarkan peristiwa aktual dan partikular. Menggunakan semiotika Charles Sanders Peirce, adegan tersebut berfungsi sebagai *sinsign*, kehadirannya secara konvensional dalam retorika politik menggambarkan partikularisme atau sikap yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.

Namun, yang lebih penting adalah bahwa apa yang ditampilkan dan diucapkan ini sekaligus merupakan *index* dari relasi kekuasaan yang lebih dalam. Kehadiran Gibran, sebagai anak Presiden

Jokowi, tidak bisa dilepaskan dari konteks politik nasional yang ditandai oleh menguatnya praktik patron-klien. Dalam hal ini, Gibran bukan hanya seorang politisi, tetapi representasi dari akses kekuasaan yang diwariskan. Ucapannya, yang ditujukan kepada Prabowo, memuat makna tersirat bahwa dukungan dari “pusat kekuasaan” sudah diamankan. Ini merupakan bagian dari mekanisme klientelisme, di mana dukungan diberikan dengan harapan timbal balik, baik dalam bentuk posisi, perlindungan hukum, atau distribusi sumber daya politik.

Film *Dirty Vote* menampilkan adegan ini bukan untuk menyoroti karisma pribadi Gibran, melainkan untuk memperlihatkan bagaimana kekuasaan dinasti bekerja secara simbolik dan praktis dalam pemilu. Simbol-simbol seperti orasi, massa pendukung, serta pengawasan dari pakar hukum disusun untuk mengesankan bahwa Gibran adalah bagian dari jaminan politik bagi Prabowo. Interpretasi ini membentuk *argument*, dimana pembacaan yang menunjukkan bahwa praktik seperti ini bukan insiden, tetapi pola tetap dalam politik Indonesia kontemporer.

Secara keseluruhan, adegan ini membangun makna klientelisme melalui serangkaian tanda yang dikaitkan secara konvensional dan kontekstual. Ia tidak berdiri sendiri, tetapi merujuk pada struktur kuasa yang lebih besar, bahwa dalam politik Indonesia, kesetiaan dinyatakan secara publik, dan kekuasaan diwariskan serta dinegosiasikan secara simbolik di ruang kampanye. Peirce memungkinkan kita untuk memahami bahwa makna tidak berhenti pada ucapan literal, melainkan berkembang dalam jaringan tanda yang kompleks dan ideologis.

#### c. Adegan Tayangan Video Menunjukkan Gestur 2 Jari Iriana Jokowi



Proses semiosis dalam adegan ini tidak

berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dalam medan pertarungan makna yang diwarnai oleh konteks politik elektoral dan relasi kuasa yang kompleks. Representamen berupa gestur dua jari yang diacungkan oleh Ibu Negara, ketika direpresentasikan ulang melalui tayangan berita televisi dan disaksikan dalam konteks film dokumenter *Dirty Vote*, mengalami transformasi makna dari sekadar isyarat tubuh menjadi simbol politis yang sarat ideologis.

Pada level denotatif, gestur ini bisa dibaca sebagai isyarat biasa, dua jari yang mungkin dimaknai sebagai salam atau spontanitas. Namun proses semiosis bergerak ke level konotatif ketika konteks politik dan sejarah makna simbol “dua jari” diaktifkan oleh penyandian sosial, yang dimana sejak awal masa kampanye, pasangan calon nomor urut 02 secara konsisten menggunakan gestur dua jari sebagai penanda identitas politik mereka. Karena itu, tanda ini tidak netral, ia adalah *legisign* atau tanda yang hanya bermakna dalam kerangka aturan dan konvensi simbolik kampanye elektoral.

Sementara itu, tayangan televisi nasional yang memuat presenter, secara eksplisit mengasosiasikan gestur ini dengan dukungan terhadap paslon 02, hal ini berfungsi sebagai amplifikasi makna dimana media tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi *membangkitkan* dan *mengafirmasi* pembacaan ideologis tertentu.

Ketika dokumenter *Dirty Vote* menghadirkan pakar hukum tata negara yang berdiri menyaksikan tayangan tersebut dalam ruang studio yang hening dan serius, penonton secara tidak langsung diarahkan untuk memaknai gestur tersebut sebagai pelanggaran etika netralitas dan penyalahgunaan simbol negara. Dengan kata lain, *Dirty Vote* menempatkan gestur ini dalam posisi sebagai “tanda kebocoran ideologis” dimana kekuasaan menunjukkan keberpihakannya secara simbolik.

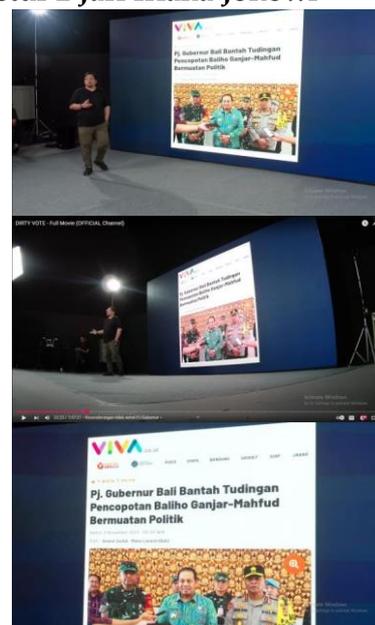
Interpretasi yang dihasilkan bukan hanya pengetahuan bahwa Ibu Negara berpihak, tetapi kesadaran akan praktik kekuasaan yang bekerja secara simbolik

dan kultural. Ini adalah bentuk semiosis yang menyentuh dimensi ideologis dalam pengertian Althusser (1971), yakni ketika aparat ideologis negara (dalam hal ini media dan institusi simbolik seperti Ibu Negara) membentuk subjektivitas warga untuk menerima status quo kekuasaan sebagai sesuatu yang normal, bahkan wajar. Penonton bukan hanya disuguhkan informasi, tetapi diajak menyaksikan bagaimana negara memproduksi makna melalui gestur, media, dan simbol.

Semiosis ini bekerja melalui *naturalization of ideology*, strategi di mana representasi politik yang memihak dikaburkan dengan kesan spontan, pribadi, atau informal. Ini memperlihatkan bahwa gestur tubuh pun, dalam konteks politik elektoral dan negara patronase seperti Indonesia, tidak pernah benar-benar netral.

Tanda, dalam pengertian Peirce, selalu bergerak dinamis dalam jaringan makna yang dikonstruksi oleh kekuasaan dan resistensinya. Oleh karena itu, dokumenter ini bukan hanya merekam realitas, tetapi membongkar proses ideologisasi yang terjadi melalui simbol sehari-hari, memperlihatkan bagaimana klientelisme dan kekuasaan disisipkan secara halus dalam representasi visual.

#### d. Adegan Tayangan Video Menunjukkan Gestur 2 Jari Iriana Jokowi



Dalam adegan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud oleh Pj. Gubernur Bali, film

*Dirty Vote* tidak hanya menampilkan satu fakta politik, tetapi merangkainya dalam struktur naratif yang mengundang penonton untuk melihat lapisan kekuasaan yang bekerja di baliknya. Headline dari Viva.co.id, yang ditampilkan besar di layar LED dengan judul “Pj. Gubernur Bali Bantah Tudingan Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud Bermuatan Politik”, menjadi titik masuk yang menyiratkan adanya konflik makna. Di balik bantahan itu, kamera dengan sudut low angle menampilkan tubuh narator yang menjelaskan, menciptakan posisi “otoritatif” di hadapan berita yang secara visual dibingkai sebagai ‘objek analisis’.

Narasi Feri Amsari memperjelas bahwa apa yang disebut “penertiban atribut” memiliki dimensi politik yang tidak bisa dipisahkan dari konteks kekuasaan dan pemilu. Dengan kata lain, tindakan administratif yang tampak netral justru merupakan bentuk kekuasaan simbolik untuk membungkam representasi kelompok tertentu. Pemilihan komposisi visual yang mengandung gambar Pj. Gubernur berdiri bersama aparat keamanan (TNI, Polri) meberikan dimensi ideologis bahwa kekuasaan sedang berkoalisi dengan berbagai macam aparatur negara.

Suara narator menjadi penggerak tafsir yang menyusun lapisan makna dengan tone yang kritis namun tenang. Editing yang memperbesar cuplikan headline usai menyorot panggung dalam berbagai angle memberi efek visual bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dalam pemberitaan tersebut dan perlu dicermati. Di sinilah aspek intertekstualitas bekerja, film tidak hanya menyampaikan ulang berita, tetapi menyandingkannya dengan narasi hukum tata negara dan fakta-fakta politik, sehingga membentuk kritik terhadap manipulasi aparatur negara untuk kepentingan elektoral.

Pemaknaan ini semakin kuat dengan pilihan shot wide angle dan *off-center composition*, narator tidak selalu berada di tengah layar, seolah memberi ruang kepada “tanda-tanda” lain untuk berbicara. Film ini secara ideologis

mengambil posisi oposisi terhadap kekuasaan yang mempolitisasi netralitas, menolak normalisasi tindakan pejabat yang menciderai demokrasi.

#### e. Adegan Tayangan Video Deklarasi Dukungan dari Kepala Desa



Dalam adegan “Ribuan Kades Dukung Prabowo-Gibran”, film *Dirty Vote* secara tajam mengonstruksi makna politik klientelisme melalui strategi tanda yang kompleks. Tayangan dimulai dengan narator Zainal Arifin Mochtar berdiri di depan layar besar, memperlihatkan dokumentasi video ribuan kepala desa yang memenuhi GBK. Ini adalah representamen yang secara *sinsign* menghadirkan peristiwa konkret. Penekanan pada jumlah besar, keseragaman seragam ASN, dan penggunaan teks berita dari media kredibel (Tribunnews) memperkuat objektivitas peristiwa.

*Object* yang ditunjuk bukan hanya sekadar dukungan, tetapi lebih dalam, adanya relasi patron-klien antara kekuasaan negara (yang mampu menggerakkan kepala desa) dan posisi masyarakat akar rumput yang direpresentasikan oleh para kepala desa. Ini merupakan *index* dari struktur kekuasaan yang disfungsi, karena kepala desa menjadi alat kekuatan politik, bukan wakil masyarakat.

*Interpretant*-nya sendiri muncul dari narasi verbal, ekspresi tubuh narator, dan

rangkaian visual yang disusun logis. Zainal Arifin Mochtar dengan berdiam diri memberi kesan ruang bebas bagi penonton untuk mencerna realitas demokrasi sedang berjalan.

Argumentatifnya narasi dibangun secara berlapis melalui data, *footage*, kutipan langsung Asri Annas (“kami tidak terlalu peduli janji, yang penting siapa yang peduli desa”), hingga reaksi wartawan. Semua ini membentuk interpretant bahwa praktik politik yang tengah berlangsung adalah bentuk korupsi moral demokrasi.

Struktur visual film ini sangat intensional. Pemilihan *footage* dengan komposisi gambar memperlihatkan kerumunan massa dari angle atas dan lebar (*wide shot*), menunjukkan besarnya skala mobilisasi. Transisi yang cepat antara *footage* kerumunan dan wawancara membuat pesan terasa mendesak. Intertekstualitas bekerja melalui kombinasi antara narasi hukum, dokumentasi media, dan realitas sosial, menciptakan teks yang sarat kritik politik. Pembuat film jelas mengambil posisi sebagai subjek pemakna yang kritis terhadap penggunaan kekuasaan untuk manipulasi elektoral.

#### f. Adegan Menyangkan Pidato Menteri dengan Membagikan Bansos



Adegan ini memperlihatkan secara gamblang bagaimana bantuan sosial yang seharusnya netral dan berdasarkan asas keadilan sosial dijadikan komoditas politik. Dalam peristiwa ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan secara terang-terangan menyampaikan pesan politis dalam forum publik sambil mengidentifikasi Jokowi sebagai bagian

dari partainya (PAN), dan mengarahkan dukungan kepada Gibran, anak presiden yang mencalonkan diri dalam pemilu.

Dari perspektif semiotika Peirce, ini adalah *sinsign* karena visualnya adalah dokumentasi dari peristiwa aktual dan spesifik. Namun, lebih dari sekadar dokumentasi, gambar ini menjadi *index* dari fenomena politik klientelisme, ia mengaitkan langsung antara pejabat publik dan tindakan kampanye terselubung di luar ruang kampanye resmi.

Sebagai *interpretant*, penonton dituntun untuk menyadari bahwa tindakan ini memiliki argumentasi yang kuat, dimana ada logika di balik simbol yang menyiratkan keterhubungan sistemik antara kekuasaan, logistik negara, dan manipulasi elektoral.

Visual ini juga kuat secara simbolik dan dramaturgis. Komposisi kerumunan rakyat yang mengangkat tangan, seragam biru partai, dan ekspresi antusias massa, membentuk latar belakang yang kontras dengan fungsi netral kementerian. Di layar pun muncul teks “**POLITISASI BANSOS MAKIN PARAH**” dan “**KECURANGAN DI KALANGAN PEJABAT NEGARA,**” yang menggarisbawahi posisi ideologis film sebagai *subjek pemakna* yang kritis terhadap penyalahgunaan jabatan publik.

Film ini memposisikan Bivitri Susanti sebagai pengamat yang tenang, bukan sebagai agitator, namun dipenuhi dengan gestur ironi dan keprihatinan. Audio dalam video ini bukan hanya menjelaskan, tapi membentuk struktur naratif reflektif yang menghubungkan potongan-potongan fakta ke dalam jejaring makna yang lebih luas.

#### g. Adegan Pakar Hukum Menerangkan Konsep Pork Barrel Politic



Adegan ini adalah contoh kuat dari penggunaan *montase visual* dan *voice-*

over reflektif dalam esai film *Dirty Vote* untuk menyingkap makna politik tersembunyi di balik tindakan pemerintah yang tampaknya “pro-rakyat”. Foto karikatur Presiden Jokowi dengan babi adalah bentuk satir visual yang mengejutkan namun mengena. Dalam konteks Indonesia, babi juga memiliki konotasi negatif secara budaya dan agama, sehingga penggunaannya mengintensifkan nada kritik.

Namun film ini tidak semata menggantung makna pada gambar. Narator, Bivitri Susanti, menjelaskan secara historis dan politis makna *pork barrel*, dari asal-usulnya di masa perbudakan AS hingga relevansinya dalam praktik distribusi dana publik secara politis. Penonton diajak tidak hanya menertawakan satire, tetapi merenungkan keseriusan praktik tersebut, yaitu bagaimana uang negara digunakan sebagai alat untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan, bukan untuk kepentingan rakyat.

Dalam kerangka semiotika Peirce, montase ini adalah *legisign* karena ia membentuk kritik melalui konvensi visual yang dikenali publik, seperti halnya babi sebagai simbol kerakusan, gentong sebagai metafora penimbunan, dan posisi Jokowi sebagai agen distribusi.

Objek dari tanda ini sendiri bukan literalitas gambar, melainkan simbol dari sistem politik patronase, dikarenakan makna “*pork barrel*” tidak ada hubungan langsung dengan babi atau gentong dalam arti literal. Ia mengacu pada sistem praktik patronase melalui konvensi politik tertentu.

Sementara interpretant-nya bersifat argumentatif berdasarkan pemahaman logis dan kritis terhadap ketimpangan kekuasaan dalam sistem demokrasi elektoral yang sarat konflik kepentingan. Gambar dan penjelasan verbal dalam adegan secara bersama-sama membentuk sebuah alasan logis bahwa praktik distribusi bansos yang masif di masa akhir pemerintahan Jokowi bukanlah murni kebijakan sosial, melainkan strategi politik. Adegan ini

juga bekerja secara intertekstual, mengacu pada banyak realitas di luar film seperti laporan media tentang bansos, dokumen kebijakan fiskal, serta wacana publik mengenai “presiden cawe-cawe”. Sehingga, dalam satu adegan ini membungkus berbagai macam bentuk politik transaksional ke dalam satu metafora tajam.

#### h. Adegan Menayangkan Pidato Menteri dengan Membagikan Bansos



Adegan ini merepresentasikan salah satu puncak argumentatif dalam film *Dirty Vote* yang menggabungkan kekuatan visual satir, narasi verbal akademis, dan struktur presentasi digital untuk menyampaikan kritik terhadap praktik politik dinasti. Representamen utama adalah ilustrasi karikatural Anwar Usman yang menggendong Gibran Rakabuming, dibingkai dengan kalimat “TAK GENDONG KE MANA-MANA”. Ini adalah *legisign* yang memanfaatkan konvensi visual populer dalam budaya Indonesia (karikatur dan plesetan lagu rakyat) untuk menyampaikan pesan yang tajam namun mudah diakses publik.

Objek yang dirujuk tidak lain adalah praktik klientelisme dalam bentuk yang lebih halus namun berbahaya, dimana penggunaan jalur hukum oleh elite kekuasaan untuk meloloskan kerabat dalam kontestasi elektoral. Karena ilustrasi ini menunjuk pada relasi nyata antara individu dan institusi, ia bersifat *indexical*, mengarah langsung ke kejadian konkret dan keterkaitan personal di balik keputusan hukum.

Interpretasi yang muncul dari rangkaian tanda menciptakan argument yang kuat, bukan sekadar reaksi emosional atau asumsi. Dengan gaya khas essay film, Zainal Arifin Mochtar tidak menyerang secara frontal, melainkan membiarkan gambar dan fakta berbicara. Namun, penyusunan elemen-elemen

dengan struktur naratif yang koheren menjadikan pemaknaan bersifat logis dan retorik. Gambar besar dengan narator berdiri di depannya memberi efek “kuliah umum,” dimana penonton seolah diajak menyaksikan bukti visual di ruang kelas publik.

Frasa plesetan “tak gendong ke mana-mana” mengandung ironi kuat yang menegaskan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara meritokratik, tetapi dibawa kemana-mana melalui relasi keluarga. Hal ini sejalan dengan definisi klientelisme yang menerangkan soal hubungan timbal balik antara patron dan klien yang berlangsung tidak hanya dalam bentuk pemberian materi, tetapi juga dalam penyediaan akses kekuasaan.

Dalam konteks ini, *Dirty Vote* tidak hanya menyampaikan tanda, tetapi menyusun sistem pemaknaan yang mengungkap bagaimana hukum dikendalikan oleh patronase kekuasaan, sebuah bentuk klientelisme yang jauh lebih sistemik dan membahayakan tatanan demokrasi.

## 2. Pembahasan Representasi Klientelisme dalam Film Esai *Dirty Vote*

Berdasarkan analisis semiotik terhadap film *Dirty Vote* menggunakan teori Charles Sanders Peirce, ditemukan tiga kategori temuan utama yakni reflektif, konstruktif, dan intensional.

Temuan reflektif mencerminkan bagaimana film ini mengangkat praktik klientelisme politik melalui penayangan arsip visual seperti kliping berita, cuplikan orasi politik, dan dokumentasi pernyataan elite pemerintahan.

Adegan-adegan seperti siluet pakar hukum hingga narasi tentang Menteri yang terang-terangan berkampanye, direpresentasikan secara sinematik untuk mengungkap wajah manipulatif kekuasaan yang menyaru sebagai komunikasi netral.

Film ini juga memantulkan realitas politik aktual dengan gaya visual yang kontras, terang untuk kekuasaan, gelap untuk kebenaran yang terpinggirkan.

Representasi ruang dan gestur tubuh dalam berbagai adegan memperlihatkan bagaimana kekuasaan direproduksi dalam ruang visual sehari-hari dan simbolik.

Temuan konstruktif muncul melalui narasi para pakar hukum yang tidak hanya menjelaskan tetapi juga menyusun ulang pemahaman audiens terhadap praktik pemilu. Dengan nada tenang namun sarat ironi, para pakar menjelaskan konsep seperti pork barrel, manipulasi lembaga independen seperti KPU dan MK, serta kritik terhadap netralitas aparaturnegara.

Dalam hal ini, film tidak sekadar mendokumentasikan fakta, melainkan membentuk logika interpretatif baru yang menunjukkan keterlibatan struktural antara elite politik dan birokrasi negara dalam jaringan klientelistik. Adegan seperti Zainal berdiri di depan ilustrasi “tak gendong ke mana-mana” tidak hanya memperkuat makna, tetapi membangun kesadaran baru bahwa hukum pun bisa menjadi alat reproduksi kekuasaan melalui hubungan patron-klien.

Adapun temuan intensional dapat dilihat dari bagaimana *Dirty Vote* secara sadar menempatkan dirinya sebagai film esai, bukan hanya dokumenter informatif, narasi dan representasi visual yang ditayangkan memberikan penonton pemahaman yang komprehensif tentang apa yang harus disadari dan bagaimana demokrasi seharusnya berjalan dalam konteks bernegara.

Melalui montase yang cermat, narasi kritis, dan simbol-simbol visual yang ironis, film ini memberikan seruan moral dan politis (call to action) kepada penonton untuk merefleksikan kondisi demokrasi yang telah direduksi menjadi ruang transaksional antara kekuasaan dan suara rakyat.

Strategi visual seperti simbol politik Iriana Jokowi yang diframing dengan dominasi layar besar, adegan siluet pakar hukum dan karikatur Anwar Usman menggendong Gibran, menunjukkan bagaimana estetika visual digunakan sebagai medium resistensi. Film ini tidak menawarkan kesimpulan tunggal, tetapi menyerahkan tafsir kepada audiens untuk

menggugat, mempertanyakan, dan terlibat dalam wacana etis tentang arah demokrasi Indonesia.

## **PENUTUP KESIMPULAN**

Hasil analisis menunjukkan bahwa Dirty Vote tidak hanya menyajikan fakta-fakta politik, tetapi juga menyusun struktur visual, narasi, dan simbol secara strategis untuk mengonstruksi pemahaman kritis terhadap realitas politik kontemporer Indonesia.

Secara umum, temuan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori utama yakni temuan reflektif, yaitu bagaimana Dirty Vote merefleksikan dinamika politik klientelisme melalui penggunaan arsip visual seperti kliping berita, dokumentasi kampanye, pidato elite, serta simbol-simbol politik seperti gestur dua jari Ibu Negara atau pidato Gibran. Representasi ini menjadi cerminan atas manipulasi demokrasi melalui tindakan simbolik yang tampak biasa, namun sarat makna ideologis.

Selanjutnya temuan konstruktif, yakni bagaimana film membangun struktur pengetahuan baru bagi penonton melalui narasi para pakar hukum tata negara. Penjelasan tentang konsep pork barrel, manipulasi lembaga seperti KPU dan MK, serta keterlibatan aktor negara dalam kampanye secara tidak langsung, membentuk kritik sistematis terhadap praktik klientelisme struktural. Dengan menggabungkan elemen visual dan verbal, film ini menyusun ulang pemaknaan terhadap peristiwa politik menjadi narasi resistensi.

Terakhir temuan intensional, yaitu bahwa Dirty Vote secara sadar membentuk dirinya sebagai film esai yang menyusun *counter-narrative* terhadap narasi hegemonik negara. Film ini tidak menutup diri melalui tafsir tunggal, namun memberikan ruang bagi audiens untuk membentuk sikap kritis terhadap proses demokrasi yang sarat pelanggaran etis. Cara penyampaian yang memantik audiens untuk berpikir dan sadar merupakan bentuk seruan moral yang memperkuat intensi

ideologis dari karya ini, bahwa demokrasi perlu dipertahankan bukan hanya dari aspek prosedural, tetapi juga dari nilai-nilai keadilan dan integritas.

Sehingga, Dirty Vote dapat dipahami sebagai teks budaya yang merepresentasikan dan mengkritik praktik klientelisme dalam politik elektoral Indonesia melalui penggunaan tanda-tanda visual, simbolik, dan naratif yang kompleks serta multimakna.

## **SARAN**

Berdasarkan temuan dan simpulan penelitian ini, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

Bagi akademisi dan peneliti, film esai seperti Dirty Vote dapat dijadikan sebagai objek kajian yang kaya untuk penelitian interdisipliner, khususnya dalam kajian media, politik, dan budaya visual. Penggunaan pendekatan semiotik terbukti efektif dalam mengungkap makna tersembunyi di balik representasi visual politik.

Bagi pemerintah dan lembaga pemilu, temuan dalam film ini menjadi refleksi penting terhadap perlunya netralitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu. Penempatan pejabat dalam posisi strategis harus mempertimbangkan independensi dan tidak semata-mata berdasarkan afiliasi politik.

Bagi masyarakat umum, penting untuk meningkatkan literasi media dan kesadaran kritis dalam mengonsumsi tayangan politik, termasuk kampanye dalam bentuk simbolik. Demokrasi yang sehat menuntut partisipasi warga yang sadar akan manipulasi politik yang tersembunyi di balik citra, gestur, dan narasi kekuasaan.

Bagi pembuat film dan aktivis, pendekatan film esai terbukti dapat menjadi medium efektif untuk menyampaikan kritik sosial-politik. Kombinasi antara data, ironi visual, dan narasi pakar menghasilkan kekuatan retorik yang mampu menggugah kesadaran publik secara mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, E., & Suratnoaji, C. (2024). Framing Analysis of the 2024 Election in the Documentary Film “Dirty Vote”. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*. Retrieved from <https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/jipik/article/view/1130>
- Althusser, L. (1971). *Lenin and Philosophy and Other Essays* (B. Brewster, Trans.). Monthly Review Press.
- Aspinall, E. (2013). *A Nation in Fragments, Critical Asian Studies* 45(1): 32-34.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Berenschot, W. (2018). *The political economy of clientelism: A comparative study of Indonesia's patronage democracy. Comparative Politics*, 50(3), 361–381.
- Ferdiansah, F. (2024). *Dirty Vote Film: Unruly Politics Movement In Digital Space*. *Jurnal Studi Journalistik*. Retrieved from <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jsj/article/view/42168>
- Kompas. (2024, Februari 12). *Laporan Dugaan Netralitas ASN dalam Pemilu 2024*. <https://www.kompas.com>
- Rascaroli, L. (2009). *The personal camera: Subjective cinema and the essay film*. Wallflower Press.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c.1200* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Sari, W. P., Putriana, M., Firstia, R., Fauzan, B., Abdillah, F. A., Ningrum, D. R. H. A., & Sunaryo, R. A. (2024). Pengaruh Terpaan Film Dokumenter Dirty Vote Terhadap Opini Pengguna Twitter Pada Masa Tenang Pemilu.
- NIVEDANA: *Jurnal Komunikasi dan Bahasa*. Retrieved from <https://radenwijaya.ac.id/jurnal/index.php/NIVEDANA/article/view/1265>
- Sobur, A. (2021). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.